

EDISI : Selasa, 03 September 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Pembangunan

Tunggu Revisi Izin Penlok Kelebihan 14 Hektar Lahan Bendungan Tamblang

Singaraja (Bali Post) -

Rencana pembangunan Bendungan Tamblang di Kecamatan Kubutambahan sejauh ini belum bisa direalisasikan. Pasalnya, sampai sekarang ini masih tahap persiapan pembebasan lahan warga yang terkena jalur proyek di sana. Pembebasan lahan ini terganjal hasil pengukuran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng. Dalam simpulannya, ada kelebihan lahan 14 hektar dari total luas lahan 58,79 hektar yang sudah ditetapkan pada Izin Penetapan Lokasi (Penlok) dari Gubernur Bali Wayan Koster. Atas hasil pengukuran ini, Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali - Penida memproses revisi izin penlok tersebut.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Bendungan BWS Bali - Penida I Gusti Putu Wandira yang dihubungi Senin (2/9) kemarin, membenarkan pihaknya sekarang melakukan persiapan pengajuan kemungkinan revisi izin penlok itu. Menurutnya, dari perencanaan itu agar ditindaklanjuti izin penlok dari Gubernur. Rencananya, bendungan itu dibangun di atas tanah seluas 58,79 hektar. Tanah itu milik warga Desa Sawan dan Desa Bebetin (Kecamatan Sawan) dan juga warga Desa Bila dan Desa Bonthing (Kecamatan Kubutambahan).

Setelah izin penlok itu terbit, BPN Buleleng ditugas-

kan untuk memverifikasi dan melakukan pengukuran ulang lahan yang menjadi lokasi inti proyek itu. Dari proses ini, BWS kemudian telah menerima hasil di mana muncul kelebihan luas tanah yang masuk lokasi proyek itu.

"Kita sudah terima hasil pengukuran dan identifikasi dari BPN. Benar ada kelebihan luas dari yang sudah diterbitkan pada penlok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali," katanya.

Sesuai hasil inventarisasi BPN kata Putu Wandira, kelebihan tanah itu sebagian besar lantaran adanya tawaran pemilik tanah agar pemerintah membeli sisa luas tanah yang tanggung itu. Pertimbangan

pemilik, tanah sisa itu tidak menguntungkan dipergunakan untuk buka usaha.

Ada juga tanah yang posisi awal berbentuk segitiga. Pemiliknya kemudian minta agar pada pembebasan lahannya menjadi rata persegi empat. Sehingga hal itu membuat luas tanah bertambah dari perencanaan yang sudah disusun BWS.

Tidak itu saja, dari rancangan desain yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan itu, ada pemilik tanah yang belum masuk dalam dokumen tersebut. Kemudian saat diukur BPN, lahan itu masuk dalam areal proyek. "Saat pengukuran oleh BPN, warga memohon sisa lahan

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *Sambungan*

yang sedikit itu agar dibeli. Ada juga nama pemilik tanah yang belum masuk di perencanaan, sehingga saat diukur baru muncul. Hal itu membuat ada tambahan luas tanah yang terkena jalur proyek," jelasnya.

Atas hasil pengukuran itu, saat ini BWS masih mengkaji sebelum memutuskan mengajukan revisi izin penlok kepada Gubernur Bali. Hal ini karena menyangkut kesiapan alokasi anggaran. Apakah nantinya bisa meng-cover untuk membeli kelebihan lahan itu. Atau opsi lainnya hanya cukup membebaskan lahan itu sesuai perencanaan, proyek itu riilnya perlu tanah seluas 58,79 hektar.

"Masih dipelajari, nanti kalau memang diputuskan lahannya bertambah, ya akan diajukan revisi izin penlok ke Pemprov," jelasnya.

Lebih 14 Hektar

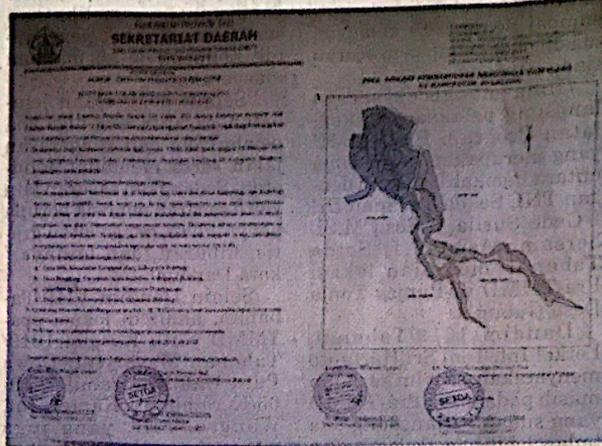
Kepala BPN Buleleng Made Sudarma mengatakan, dari hasil pengukuran dan inventarisasi fakta yuridis, maka

ditemukan ada kelebihan luas tanah lagi 14 hektar dari lahan yang sudah ditetapkan pada izin penlok itu. Setelah kelebihannya itu ditemukan, maka pihaknya telah berkoordinasi ke atasannya. Melalui koordinasi itu, BWS sebagai pembeli tanah itu agar merevisi izin penlok yang sudah terbit itu. Kalau ini tidak direvisi kemudian BPN tetap memproses pembebasannya, maka pihaknya khawatir apakah sudah cukup alokasi anggaran dari pemerintah untuk membayar kelebihan tanah itu. Selain koordinasi ke atasannya, Sudarma menyebut sudah menyampaikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Intinya, Gubernur bersedia merevisi izin penlok itu. Akan tetapi, hasil koordinasi dengan BWS belum diketahui apakah sudah diputuskan izin penlok itu direvisi atau ada kemungkinan lain.

"Memang masih ada kelebihan lahan lagi 14 hektar. Kalau ini tetap dibebaskan, maka saat pembayaran berapa kelebihan lahannya dari tar-

get anggaran yang dialokasikan. Kami sudah sampaikan kepada Pak Gubernur, akan merevisi izin penlok itu. Demikian juga BWS kami sudah

sampaikan merevisi hal itu. Namun, apa keputusan pastinya, kami belum tahu dan dapat perintah lebih lanjut," jelasnya. (kmb38)



Ball Post/kmb38

BENDUNGAN TAMBLANG - Pemprov Bali menetapkan lokasi proyek Bendungan Tamblang, di Kecamatan Kubutambahan. Setelah penlok terbit, hasil pengukuran ulang BPN Buleleng menemukan kelebihan tanah 14 hektar dari lahan yang ditetapkan seluas 58,79 hektar.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Porprov

Kirim 525 Atlet Tampil di Porprov

Buleleng Targetkan Naik ke Posisi Tiga Besar

Singaraja (Bali Post) -

Kabupaten Buleleng mem-berangkatkan 525 atlet ter-baiknya untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali. Porprov 2019 itu akan dihelat di Ka-bupaten Tabanan mulai 9 September 2019 mendatang. Ratusan atlet dari Bumi Den Bukit itu ditargetkan mengumpulkan 60 medali. Ekspektasi medali itu sejalan dengan target Buleleng in-gin naik kelas dari prestasi sebelumnya yakni dari rank-ing keempat naik ke posisi ketiga di antara sembilan kontestan, 8 kabupaten dan kota di Bali. Untuk melecut semangat kontingan berjudul Pasukan Goak Ki Anglurah Panji Sakti itu, pemkab men-janjikan bonus dengan nilai fantastis kepada atlet peraih medali pada Porprov itu.

Kontingan dari Bali Utara

dilepas Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana di lapan-gan Taman Kota Singaraja, Minggu (1/9) lalu. Pelepasan itu dihadiri Ketua DPRD sementara Gede Supriatna, Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjindra, Sp. OG. dan Ketua Umum KONI Buleleng Nyoman Artha Widnyana.

Bupati mengatakan cita-cita naik ranking di Porprov itu sudah dipersiapkan dengan matang oleh segenap jajaran KONI Buleleng. Me-lihat persiapan yang sudah dilakukan dan dukungan anggaran untuk mengikuti Porprov, pihaknya optimis pejuang olahraga dari daer-ahnya itu akan menyumb-angkan prestasi terbaik demi nama baik Buleleng di provinsi. Bila cita-cita naik peringkat itu dipersembah-kan para atlet dan ofisial, Bupati berjanji memberikan

bonus. Rinciannya, atlet peraih medali emas dipatok Rp 45 juta untuk cabang olahraga (cabor) peroran-gan. Sedangkan untuk cabor beregu sampai enam orang disiapkan bonus senilai Rp 55 juta, dan Rp 60 juta di-siapkan peraih medali emas pada cabor beregu di atas enam orang.

"Kalau (menempati) po-sisi ketiga saya yakin bisa, karena dari sisi persiapan kita sangat matang. Serta dari analisis dan kajian plus latihan-latihan intensif, saya yakin atlet terbaik Buleleng ini bisa mewujudkan impian itu," ujar Bupati.

KONI Buleleng kata Bu-pati sudah sejak awal dan sangat baik mempersiapkan diri menghadapi Porprov 2019 di Tabanan. Mulai dari perekrutan atlet, tes fisik, latihan, sampai pe-

meriksaan kesehatan atlet. Di samping itu, pihaknya memuji transparansi yang dibangun pengurus KONI Buleleng. Hal ini dinilai dapat menumbuhkan ke-percayaan dan motivasi dari seluruh atlet. Untuk mendu-king peningkatan prestasi olahraga dalam jangka pan-jang, ke depan pemerintah segera memperbaiki sarana dan prasarana olahraga yang saat ini mengalami kerusakan.

"Berbagai persiapan sudah matang dilakukan. Tampil dengan percaya diri dan manajemen kepengu-rusan yang baik, maka saya yakin akan membuahkan ha-sil maksimal," tegasnya.

Ketua Umum KONI Bule-leng Nyoman Arta Widnyana mengatakan, selain sejum-lah 525 orang atlet, Buleleng juga mengirimkan 145 orang

ofisial, pelatih, dan manajer. Sehingga secara keseluru-han kontingan Buleleng ber-jumlah 670 orang. Para atlet itu bertanding pada seluruh cabor yang dipertandingkan. Rinciannya, 39 cabor dengan 438 nomor pertandingan. Buleleng juga berpartisipasi dalam 2 cabor ekshibisi.

Terkait persiapan, pria yang menjabat Direktur PT Tirta Mumbul Jaya Abadi (Yeh Buleleng) ini menyebut, selain melakukan pelatihan secara desentralisasi di mas-ing-masing cabor. Pelatihan juga dilaksanakan secara tersentralisasi. Selain itu, tiga kali dilakukan tes kon-disi fisik bekerja sama den-gan Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha. "Dengan persiapan itu atlet sudah siap tanding meraih medali dan bukan melali," jelasnya. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

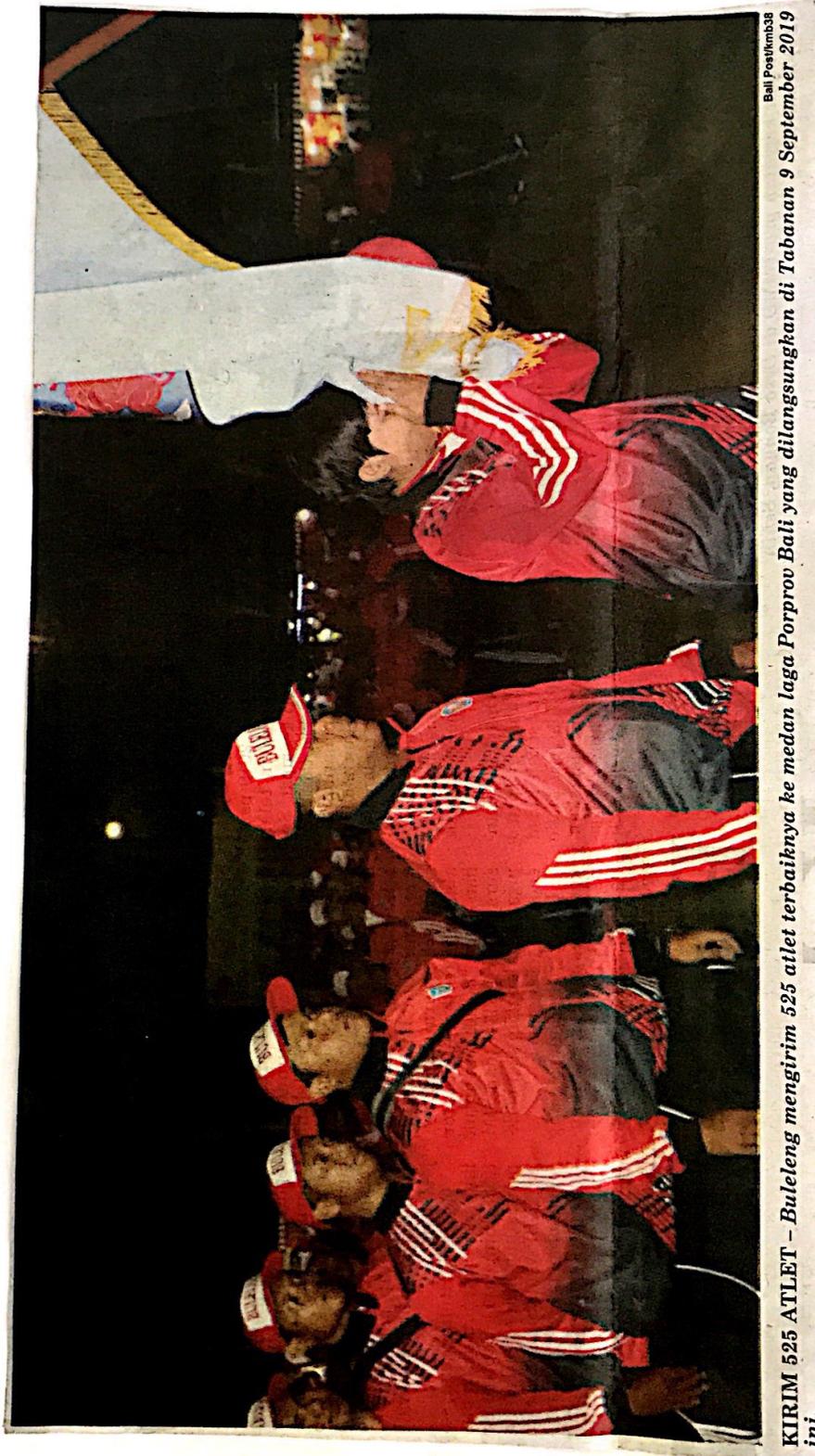
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *Sambungan*



Bali Post/kmb38
KIRIM 525 ATLET - Buleleng mengirim 525 atlet terbaiknya ke medan laga Porprov Bali yang dilangsungkan di Tabanan 9 September 2019 ini.



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : sipil

Blangko E-KTP Terbatas

Permohonan Baru Diprioritaskan, Perubahan Diganti Suket

Stok blangko e-KTP (KTP elektronik - red) dari pemerintah pusat sekarang persediannya terbatas. Akibatnya, hanya permohonan baru yang bisa dicetakkan e-KTP-nya. Atas kondisi itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng sangat selektif menerbitkan e-KTP. Lalu, bagaimanakah solusinya jika belum bisa diperoleh e-KTP itu, media apakah yang dipergunakan sebagai pengganti e-KTP?

JIKA terjadi perubahan elemen data kependudukan atau e-KTP itu misalnya hilang, maka penduduk bersangkutan diberikan surat keterangan (suket). Suket itu sudah sah sebagai pengganti e-KTP sementara. Kepala Disdukcapil Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, Senin (2/9) kemarin, mengakui ada keterbatasan terkait stok blangko e-KTP. Menurut-

nya, keterbatasan blangko e-KTP itu bukan saja terjadi di daerahnya, namun juga terjadi di kabupaten dan kota di Indonesia. Menyusul kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat kepada Disdukcapil se-Indonesia.

Dari surat No. 47113/6153/Disdukcapil tertanggal 26 Agus-

tus 2019 itu diinstruksikan kepada Dukcapil di Indonesia agar melayani pencetakan e-KTP diprioritaskan hanya untuk permohonan baru. Artinya, hanya bagi penduduk yang baru melakukan perekaman data kependudukan, yang langsung dicetakkan e-KTP. Surat itu juga memerintahkan perubahan elemen data e-KTP atau karena hilang dan sebab lainnya, untuk sementara Dukcapil di daerah dapat menerbitkan suket sebagai pengganti e-KTP.

"Sejak kami terima surat dari Dirjen, kami permaklumkan kepada masyarakat bahwa stok blangko e-KTP kita terbatas. Situasi ini terjadi di Indonesia, sehingga kita berharap masyarakat maklum dengan kondisi itu," katanya.

"Kebijakan pembatasan pemakaian blangko e-KTP

kata Nurhaeni, sifatnya sementara. Alasannya, pemerintah masih mengupayakan pengadaan tambahan stok blangko keping e-KTP itu. Dari pantauan pelayanan untuk permohonan baru itu, rata-rata antara 20 sampai 25 pemohon setiap hari kerja. Dengan rata-rata angka itu maka pihaknya memastikan kalau permohonan e-KTP baru tetap terlayani seperti biasa.

"Kami tetap merujuk surat Dirjen. Sesuai data pelayanan di lapangan, dengan stok yang ada sekarang masih mencukupi. Hanya untuk yang rekam cetak (permohonan baru - red)," jelasnya.

Sementara bagi masyarakat yang melakukan perubahan elemen data atau karena e-KTP hilang, maka penduduk yang bersangkutan diminta tidak usah

khawatir. Dengan penerbitan suket itu, maka dipastikan penduduk bersangkutan tetap bisa menggunakan dokumen itu untuk urusan administrasi kependudukan termasuk surat-menyurat penting lainnya. Ini karena, elemen data suket sendiri 100 persen sama dengan yang tertera pada e-KTP.

Demikian juga fungsi suket itu adalah legal, sehingga pihaknya menjamin penduduk yang mengantongi suket itu tidak akan ada kesulitan. Suket juga digunakan sebagai identitas resmi untuk kepentingan baik mencari pekerjaan, sekolah, mengurus jaminan kesehatan, dan urusan administrasi lainnya.

"Untuk perubahan elemen data seperti karena kawin, cerai, status sosial, untuk sementara kami terbitkan

suket. Fungsi suket itu sama dengan e-KTP. Sehingga tidak usah khawatir meskipun diberi suket, tetapi kami jamin fungsinya masih sama dan diakui seperti e-KTP umumnya," jelasnya. (mud)



Putu Ayu Reika Nurhaeni

Bali Post/kmb38

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : berita kriminal

SOSOK

Pendekatan Humanis

MEMBANGKITKAN kesadaran masyarakat agar serius menaati tata tertib berlalu lintas tidak cukup dengan menegakkan sanksi tilang saja. Akan tetapi, perlu juga pendekatan lain yang lebih efektif dan harus diupayakan, sehingga pengendara di jalan raya sadar dengan keselamatan dirinya sendiri dan juga orang lain. Salah satu pendekatan yang gencar dilakukan jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Buleleng belakangan ini adalah melancarkan aksi kampanye simpatik. Aksi simpatik itu dilakukan puluhan anggota Polisi Wanita (Polwan) di jajaran Polres Buleleng, Minggu (1/9) lalu. Bertepatan dengan *session* Operasi Patuh Agung 2019 dan hari jadi Polwan yang ke-71, mereka turun ke jalan membagi-bagikan mawar kepada pengendara sepeda motor. Aksi simpatik ini dipimpin Kasatlantas Polres Buleleng AKP Putu Diah Kurniawandari. Selain membagikan mawar kepada pengguna jalan yang didominasi perempuan dan anak-anak, anggota Polwan itu juga membagikan brosur yang berisi informasi terkait pelaksanaan Operasi Patuh Agung 2019. Pada brosur itu terungkap informasi seputaran pelaksanaan Operasi Patuh Agung. Harapannya, warga bisa benar-benar sadar menaati tata tertib berlalu lintas dengan baik. "Itu wujud kepedulian kami sebagai Polwan. Dengan cara ini, kami ingin melakukan pendekatan secara humanis kepada masyarakat. Sejatinya tidak saja sebagai seorang istri, ibu dari anak-anak, tetapi srikandi Polri yang juga melakukan peran fungsi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," katanya. Anggota Polri asal Jembrana itu, menambahkan memang tidak cukup dengan aksi simpatik, namun, dirinya bersama anggota Polwan lain dengan sukarela membagikan helm SNI gratis kepada anak-anak yang dibonceng, namun saat itu tidak menggunakan helm. Setelah memberikan helm, dirinya tetap memberi edukasi kepada pengendara tentang pentingnya penggunaan helm itu untuk melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. "Aksi simpatik ini sasarannya menyadarkan pengguna jalan agar warga itu tertib, sehingga saat berkendara dirinya selamat sekaligus juga tidak membahayakan orang lain," tegasnya. (mud)



Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG